Peran LSM dalam Mendukung Kebijakan Pengarusutamaan Gender Pada Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Alam (Studi Kasus Pada LSM RMI Bogor)

Nurmelati Septiana

Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Unlam

ABSTRACT

This research aim is to describe the role of NGOs in supporting the Gender Mainstreaming policy in natural resource management activities. It is a qualitative study by using the Focus Group Discussion (FGD) technique in data collection. Data analysis was performed descriptively based on document analysis, qualitative data and focus group interviews. This study shows that the success of the Gender Mainstreaming policy is inseparable from the active collaboration with NGOs who engaged in natural preservation. RMI Bogor, since the beginning of the program, has focused on community development activities that were responsive to gender, i.e: involving both men and women as the target of their activities. In RMI Bogor's work programs, gender issues in natural resource management are already a practical dimension which is implemented on their work programs and community assistances.

KEY WORDS: NGOs, gender mainstreaming policy, natural resource management

Pendahuluan

Keberpihakan Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender (KKG) telah dirumuskan dalam Inpres No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam bidang pembangunan nasional yang menyatakan bahwa seluruh Departemen maupun Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota harus melakukan PUG dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan. Implikasi dari komitmen ini merupakan terobosan untuk memberi keadilan dan kesetaraan bagi seluruh masyarakat, perempuan dan laki-laki, sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan sebagai

wujud pembangunan yang responsif gender.

Sejalan dengan pergeseran pendekatan pembangunan dari WID menjadi GAD maka peningkatan peran perempuan juga memiliki tantangan dan pensolusian yang berbeda. Ternyata pembangunan pro-kesetaraan yang menganut paham anti diskriminasi gender yang selama ini dilaksanakan belum mampu mendorong tercapainya perwujudan kesetaraan gender, khususnya bagi perempuan. Hal ini disebabkan adanya kesempatan pembangunan yang timpang per jenis kelamin yang berimplikasi terhadap timbulnya ketidakadilan gender dalam berbagai bidang pembangunan.

Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai salah satu lembaga di luar pemerintah, selama ini mampu menjembatani dan mengakomodir serta membantu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Bentuk perwujudannya dapat melalui pelaksanaan suatu program yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kehidupan ekonomi terutama bagi masyarakat desa, dengan tidak dibatasi ruang geraknya oleh pemerintah. Seperti yang dikemukakan oleh Sajogyo (1990), bahwa LSM memiliki peranan yang cukup penting sebagai pelaku dalam pembangunan perdesaan, disamping lembaga-lembaga yang dibina langsung oleh pemerintah.

Salah satu fokus kegiatan yang dilaksanakan oleh LSM adalah kegiatan pengelolaan sumberdaya alam, mengingat bahwa Indonesia sebagai negara terbesar kedua dalam keanekaragaman hayati di dunia setelah Brazil. Dalam penelitian ini, pertanyaan yang diajukan adalah bagaimanakah peran LSM dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya alam? Apakah kepentingan dan aspirasi perempuan dan laki-laki sudah dimasukkan dalam penyusunan program kegiatan?

Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran yang tepat mengenai implementasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender pada pengelolaan sumberdaya alam yang dilakukan oleh LSM. Berkaitan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran LSM dalam mendukung kebijakan pengarusutamaan gender pada kegiatan pengelolaan sumberdaya alam.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli - Agustus 2008, di Kota Bogor bertempat di LSM RMI Bogor. Penentuan LSM yang di ambil sebagai sampel dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa LSM RMI Bogor merupakan LSM yang aktif dalam pembinaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik Focus Group Discussion (FGD) dalam pengumpulan data . Informan dalam penelitian ini merupakan responden yang telah memenuhi persyaratan, terdiri atas pimpinan dan staf RMI Bogor.

Analisis data dilakukan secara deskriptif berdasarkan analisis dokumen dan data kualitatif hasil wawancara dan FGD.

Hasil Dan Pembahasan

Gambaran Umum LSM RMI (Rimbawan Muda Indonesia) Bogor

Rimbawan Muda Indonesia (The Indonesian Institute for Forest an Environment, RMI) dirintis pada tahun 1992 oleh empat orang perempuan remaja alumni fakultas kehutanan. RMI merupakan organisasi independen bersifat non-profit yang bergerak di bidang lingkungan hidup, khususnya pengelolaan sumberdaya alam. Didirikan pada tanggal 18 September 1992 di Bogor sebagai sebuah yayasan dengan Akte Pendirian No.78 Tahun 1992. Kantor RMI berlokasi di jalan Sempur 55 Bogor.

RMI bertujuan untuk mendukung konservasi sumberdaya alam di Indonesia dengan melaksanakan program-program penelitian dan aksi lapangan yang berhubungan dengan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarakat. RMI mendukung pengelolaan sumberdaya alam berbasis rakyat dan program-program pendidikan lingkungan yang partisipatif. Dalam perjalanannya bidang kerja RMI dipertajam pada pengelolaan sumberdaya alam, terutama sumberdaya hutan yang berbasis kerakyatan dan berkeadilan gender.

Visi RMI Bogor adalah Terwujudnya kedaulatan rakyat, perempuan dan laki-laki atas tanah dan sumberdaya alam serta sistem pengelolaannya yang adil dan lestari. Misinya adalah: (1) Memberdayakan rakyat, perempuan dan laki-laki, untuk memperkuat posisi tawar mereka atas tanah dan sumberdaya alam serta sistem pengelolaannya yang adil, setara dan lestari, (2) Meningkatkan kesadaran dan kepedulian serta mengubah pola pikir dan pola tindak para pengambil keputusan dan anggota masyarakat lainnya untuk menghormati dan menghargai hak-hak rakyat, perempuan dan laki-laki, atas tanah dan sumberdaya alam serta sistem pengelolaannya yang adil, setara dan lestari.

RMI menjabarkan misinya ke dalam program kerja pengorganisasian rakyat (perempuan dan laki-laki), pendidikan alternatif, riset dan penggalangan dukungan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (laki-laki dan perempuan) melalui program-program *life skill* untuk meningkatkan pendapatan keluarga/masyarakat (*income generating activities*) dampingan.

Aktivitas RMI Bogor

Beberapa aktivitas yang telah dilakukan oleh RMI Bogor diantaranya adalah sebagai berikut:

Konsep Kampung dengan Tujuan Konservasi (KDTK)

Menyikapi persoalan perluasan kawasan Gunung Halimun Salak di Kampung Nyuncung, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor mengusung gagasan Kampung Dengan Tujuan Konservasi (KDTK) pada tahun 2003. Konsep KDTK bertujuan untuk mendapatkan manfaat secara ekologis dan ekonomis dari hutan yang ada di sekitar wilayah tempat tinggal penduduk. Intinya dengan prinsip *leuweung heo, masyarakat ngejo masyarakat kampung nyuncung berusaha melestarikan hutan.* Gagasan KDTK dapat dilihat sebagai upaya masyarakat untuk mempertahankan keberlangsungan hidup yang dipertegas dengan penataan ulang kampung dan pembuatan kesepakatan bersama. KDTK mempunyai tujuan sebagai berikut: (1) menjaga kelestarian hutan untuk menghindari dan mengurangi terjadinya bencana alam serta perbaikan lahan kritis, (2) menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kampung yang berorientasi pada konservasi, (3) menghidupkan kembali pola pengelolaan sumberdaya hutan berdasarkan adat istiadat setempat (kearifan lokal) dan (4) aksi konkrit terhadap pihak luar, bahwa masyarakat bukan pihak yang hanya merusak lingkungan hidup dan kawasan hutan.

Selama kurun waktu tiga tahun (2003 – 2006) KDTK akhirnya menjadi perhatian tujuh kampung di sekitar Nyuncung, seperti Kampung Parigi, Malasari, Cisangku, Taluk Waru, Gunung Eusing, Cirewed dan Cibuluh. Kampung-kampung tersebut selain secara geografis berdekatan juga mempunyai hubungan sosial, emosional dan keterikatan terhadap sumberdaya yang sama. Ketika delapan kampung mulai menjalankan praktik pengelolaan yang sama maka langkah awal adalah perundingan antar-kampung untuk menyusun kesepakatan dan kesepahaman bersama dengan memunculkan gagasan Kawasan Dengan Tujuan Konservasi (KDTK). Gagasan ini diharapkan dapat menjawab ketidakpastian nasib kampung-kampung di dalam kawasan konservasi dan adanya kerjasama antar-pemerintah (desa, kecamatan, kabupaten).

Pengelolaan Sampah Terpadu Cimande

Pengelolaan sampah terpadu merupakan program lanjutan dari program pertama yang diperkenalkan kepada masyarakat di Cimande, Kampung Pending pada tahun 2006 yang terkait dengan isu-isu kesehatan reproduksi, perbaikan gizi ibu dan anak. Sebagai sasarannya adalah ibu-ibu dan pemuda usia 15 tahun. Pengelolaan sampah terpadu,

khususnya topik mengenai pengelolaan sampah dan pemanfaatan lahan pekarangan, melibatkan masyarakat di sekitar Kampung Pemding, terutama mereka yang tinggal di RW 02 Kampung Tenggek Wetan, Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Bogor. Sasaran utamanya adalah kelompok ibu-ibu dan pemuda (< 15 tahun).

Program pengelolaan sampah terpadu dilatarbelakangi oleh permasalahan sampah yang muncul di masyarakat dimana sampah rumahtangga dibuang ke lahan kosong tanpa ada pengelolaan lanjutan. Hal ini menimbulkan banyak masalah, mulai dari bau busuk sampai banyaknya kecoa, nyamuk, lalat dan tikus serta penyebab timbulnya penyakit. Tujuan program adalah menambah informasi dan pengetahuan serta keterampilan masyarakat dalam mengelola sampah secara terpadu, menanamkan kebiasaan hidup bersih, terjalinnya komunikasi dan silaturahmi antar warga dengan baik, terbangunnya kegiatan gotong royong antar warga. Dari sudut pengelolaan sampah maka masyarakat dapat memanfaaatkan lahan pekarangannya dengan menanam berbagai sayuran yang dipupuk dengan kompos hasil pengolahan sampah yang dilakukan di rumah masing-masing. Manfaat lain dari program ini adalah membuat lingkungan menjadi bersih dan hijau dan dapat menjadi media pendidikan lingkungan. Sedangkan dari sisi pemuda akan dapat membantu mereka menjadi pemuda yang memiliki etos kerja tinggi serta memiliki kepeduluan terhadap lingkungan.

Selain pengolahan limbah rumahtangga, RMI juga menginisiasi pengolahan limbah pertanian di Cibungbulang. Mulanya masyarakat sulit didekati karena adanya keraguan tentang maksud dari RMI, tetapi setelah dua bulan dan bolak balik akhirnya timbul kepercayaan kepada fasilitator RMI bahwa penanganan limbah pertanian merupakan salah satu upaya membuka lapangan kerja dan menambah pendapatan keluarga/masyarakat.

Sekolah Perempuan

Program Sekolah Perempuan dibentuk di Mekarsari pada tahun 2004, sudah berjalan lebih dari dua tahun. Tujuan pengajaran antara lain adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan perempuan dalam proses pembelajaran kawasan dan agar ibu-ibu lebih mampu memperjuangkan masalah lingkungan dan pengelolaan hutan. Sekolah lingkungan ini diikuti oleh ibu-ibu dari empat kampong (Cihaneut, Ciburial, Lebak Larang dan CIladu). Intinya adalah membangun pemahaman perempuan tentang hak-hak dasar manusia.

Isu awal pembentukan program sekolah perempuan di Mekarsari didasari oleh fakta ketidakterlibatan perempuan dalam pengelolaan hutan dimana mereka hanya terlibat pada pengelolaan tanaman

padi sawah, hama plus tanaman palawija (cabe, hortikultura). Jadi ada pembagian kerja yang sangat jelas. Berdasar pengembangan pengetahuan dan wawasan maka dibutuhkan kegiatan yang dapat member manfaat ekonomi bagi anggota kelompok. Dengan memperhatikan keaktifan dari kelompok ibu-ibu maka dibentuk kelompok Swadaya Perempuan Ciladu, Kelompok Swadaya Pangan Perempuan Ciburial, dan Kelompok Sauyunan Cihaneut. Tiga kelompok ini kemudian bersepakat untuk melakukan usaha bersama dengan diawali oleh kegiatan mengidentifikasi potensi produk lokal di kampung masing-masing. Kepada kelompok perempuan tersebut kemudian mulai diajarkan cara penyusunan rencana bersama di dalam mengelola sumberdaya alam bersama sebagai *gerakan bersama*.

Pada tahap awal mereka mengelola tanaman singkong. Selama lebih dari dua tahun sudah menghasilkan olahan produk singkong menjadi keripik singkong dengan hasil sebanyak 10 – 20 kg per minggu. Sebagai pendapatan kelompok produk ini perlu dipasarkan dan memunculkan peluang pemasaran dan juga kegiatan menanam untuk menambah produk singkong sebagai bahan baku pembuatan keripik singkong. Dengan kesibukan ini maka diperkenalkan konsep *day care* kepada kelompok perempuan dengan tujuan bergiliran dalam bekerja (agar kegiatan pengasuhan anak tidak terbengkalai), jadi pada praktiknya dalam anggota kelompok, ada yang bekerja dan ada yang mengasuh anak.

Kampung Pendidikan Lingkungan (Kampung Pending)

Kampung Pendidikan Lingkungan berlokasi di kampung Bojongmenteng, Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin Bogor. Kampung Pending merupakan bagian dari Yayasan RMI yang dikelola secara khusus dengan lebih fokus pada penyelenggaraan kegiatan pendidikan, khususnya pendidikan lingkungan bagi masyarakat hulu dan hilir serta mengelola fasilitas yang dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan dan sosial masyarakat sekitar lokasi Kampung Pending.

Misi utama Kampung Pending adalah memberikan pelayanan secara professional dengan sentuhan kekeluargaan, fasilitas yang menyatu dengan alam, dengan program-program yang memberikan pengkayaan wacana Pendidikan Lingkungan yang khusus dan praktis. Program-program yang dikelola di Kampung Pendidikan Lingkungan adalah : (1) PADI (Paket Pendidikan) yang terdiri atas program keterampilan oleh limbah, terampil eksplorasi sungai dan terampil berkebun, (2) PEKAT (Pelatihan SIngkat) antara lain pelatihan kepemimpinan berperspektif gender.

Wacana Gender dalam program kerja RMI Bogor

Sejalan dengan visi, misi dan area pekerjaan RMI Bogor yang menitikberatkan pada keadilan rakyat, laki-laki dan perempuan, maka isu-isu tentang gender dalam pengelolaan sumberdaya alam sudah merupakan dimensi praktis, yang diimplementasikan pada program-program kerja dan pendampingan masyarakat. Pendampingan masyarakat, lelaki dan perempuan, yang diawali pada tahun 1996 memang masih mengalami perlawanan karena persoalan budaya dan kultur masyarakat yang masih melihat bahwa ada perbedaan yang jelas antara peran perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan hutan.

Pada tahun 1999 mulai dirancang formulasi pelatihan untuk perempuan dan sumberdaya alam (hutan, laut, tambang). Kemudian diikuti dengan pengelolaan sumberdaya alam dan gender sebanyak dua putaran dan tiga tahap, masing-masing selama 10 hari. Berbagai LSM lainnya mulai tertarik dan diikuti oleh permintaan Departemen untuk memfasilitasi pelatihan untuk pemerintah dan LSM tentang pengelolaan sumberdaya alam yang terkait gender. Sampai kini, secara praktik program dan kegiatan RMI selalu melibatkan perempuan dan laki-laki secara berkesetaraan dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

Model dan Bentuk Pendampingan

Model pendampingan yang selama ini dilakukan oleh RMI Bogor dalam bentuk konsultasi, pelatihan *softskill*, pembinaan kelompok, pengembangan *income generating activities.* Bentuk kerjasama pendampingan selama ini dilakukan lebih bersifat kemitraan, partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan secara kemandirian masyarakat lokal dampingan.

Kesimpulan

Keberhasilan kebijakan Pengarusutamaan Gender tidak terlepas dari kolaborasi aktif dengan LSM yang bergerak di bidang pemeliharaan kelestarian alam. LSM RMI Bogor, sejak awal program sudah fokus pada pembinaan masyarakat dengan kegiatan yang responsif gender, yaitu melibatkan laki-laki dan perempuan sebagai sasaran kegiatan mereka.

Pada program-program kerja RMI Bogor, isu-isu tentang gender dalam pengelolaan sumberdaya alam sudah merupakan dimensi praktis yang diimpelementasikan pada program-program kerja dan pendampingan masyarakat.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh LSM RMI Bogor, antara lain yaitu Konsep Kampung dengan Tujuan Konservasi (KDTK), Pengelolaan Sampah Terpadu Cimande, Sekolah Perempuan dan Kampung Pendidikan Lingkungan (Kampung Pending).

Peran aktif Pemerintah Daerah, lembaga donor dan partisipasi aktif masyarakat sekitar hutan turut mendukung keberhasilan program dan kegiatan yang dilakukan oleh LSM.

Daftar Pustaka

Buletin RMI, Edisi III, Juli. 2006. Kampung dengan Tujuan Konservasi Pengetahuan dan Praktek Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat di Kampung Nyuncung. Buletin Kabar Sanggabuana.

BPS dan KPP RI. 2006. Pembangunan Manusia Berbasis Gender. Kerjasama Badan Pusat Statistik dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.

Hendarti, L. 2007. Natural Resources Management and Gender Relation in Halimun Mountain Area, Java Island, Indonesia. Departement of Forest Sciences College of Agriculture and Life Sciences Seoul National University.

Sajogyo, P. 1990. Partisipasi LSM dan LPSM Dalam Pembangunan di Pedesaan Jawa Barat. Pusat Studi Pembangunan Lembaga Penelitian IPB.

Tim. 2006. Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di 9 Sektor Pembangunan. Bappenas kerjasama dengan KPP-RI.